

Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMKN 1 Guguk

Pebri Kurniawan¹, Waskito²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Negeri Padang

e-mail: briellakurniawan@gmail.com¹, waskito@ft.unp.ac.id²

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran penting dalam penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi secara efisien dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat diterapkan PPID sekolah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi di SMKN 1 Guguk dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan struktur organisasi PPID yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelatihan rutin anggota PPID menjadi kunci untuk mencapai tujuan transparansi dan efisiensi. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi yang dapat diterapkan melalui PPID di lingkungan pendidikan.

Kata kunci: *PPID, Keterbukaan Informasi, Transparansi*

Abstract

Information and Documentation Management Officers (PPID) have an important role in providing, managing and disseminating information efficiently and transparently. This research aims to identify and analyze strategies that can be implemented by school PPID to increase the effectiveness of information and document management. This research uses a qualitative approach by collecting data through observations at SMKN 1 Guguk. The research results show that implementing a clear PPID organizational structure, utilizing information technology, and regular training of PPID members are the keys to achieving the goals of transparency and efficiency. This study contributes to a deeper understanding of strategies that can be implemented through PPID in educational settings.

Keywords : *PPID, Information Openness, Transparency*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi dan Dokumen Republik Indonesia Tahun 2021. Pengelola dokumen informasi (selanjutnya disebut PPID) adalah pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pendokumentasian, dan pendokumentasian. Transparansi

dan hak atas informasi, yaitu bagaimana organisasi memastikan transparansi dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan eksternal dan internal. Hal ini termasuk penegakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan pedoman terkait (Ramadhanty, 2020).

Di era informasi digital yang berkembang pesat, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) menjadi semakin penting khususnya di lingkungan pendidikan (Sari & Ahmad, 2017). Sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai tanggung jawab besar untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan sekolah (Nababan, 2019).

Sekolah modern menghasilkan dan mengelola sejumlah besar informasi dan dokumen, termasuk data siswa, kurikulum, keuangan, dan manajemen sekolah. Mengelola informasi ini secara efisien dan transparan merupakan sebuah tantangan, terutama mengingat pertumbuhan volume data dan perkembangan teknologi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menetapkan standar kebebasan informasi dan hak masyarakat untuk mengakses informasi publik (Baharuddin, 2020).

Transparansi informasi di lingkungan pendidikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, memungkinkan orang tua berpartisipasi dalam pendidikan anaknya, dan mendukung akuntabilitas lembaga pendidikan (Alou, Liando, & Lengkong, 2021). Anggota PPID, termasuk guru dan administrator, perlu memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya pengelolaan informasi yang baik dan perannya dalam menjamin transparansi sekolah. Pelatihan dan pengembangan merupakan kunci keberhasilan penerapan strategi PPID. Perkembangan teknologi informasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi di sekolah. Penggunaan sistem informasi terintegrasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk memenuhi persyaratan UU KIP dan memfasilitasi akses informasi (Sari, Dewi, Ruslyhardy, & Sudaryanto).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan mengidentifikasi strategi efektif untuk memperkuat peran PPID di sekolah. Dengan memahami kompleksnya tantangan yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan informasi dan memasukkan peran strategis PPID, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap optimalisasi pengelolaan informasi di lingkungan Pendidikan.

METODE

Penelitian kualitatif berupaya memahami suatu fenomena secara mendalam melalui penjelasan, interpretasi, dan makna konteks sosialnya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam dalam konteksnya, memperoleh interpretasi dan wawasan yang mendalam, serta mengeksplorasi makna dan proses yang kompleks (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi di SMKN 1 Guguak dan studi Pustaka untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat diterapkan PPID sekolah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terdahulu yang membahas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran penting dalam penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi secara efisien dan transparan disajikan dalam table 1 di bawah ini.

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang membahas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Muhammad Arifin, 2016	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 pada Dinas Bina Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar	Dinas Bina Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar dinilai belum menerapkan asas keterbukaan, yaitu masih banyak dari seluruh hasil kegiatan dan kinerja tidak dapat diketahui oleh publik serta beberapa kasus sengketa informasi yang sedang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau terkait tidak ditanggapinya pemohon informasi oleh OPD Kabupaten Kampar
Fara Merian Sari, Citra Mutiara Dewi (2022)	Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu membangun sistem keterbukaan informasi publik yang reliable. Namun, penggunaan teknologi informasi belum optimal serta akses pemilih yang masih terbatas oleh informasi yang memadai dikarenakan pengelola belum melakukan pembaharuan data dan personalisasi secara berkelanjutan
Lani L. A. Alou, Daud M. Liando (2021)	Efektivitas Program Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian adalah efektivitas program pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum efektif, disebabkan oleh keterlambatan pelayanan, personel pengelola yang memiliki rangkap beban kerja, anggaran yang tersedia untuk kegiatan sangat terbatas sehingga menghambat upaya pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Aliffasha Putri Ramadhanty (2023)	Strategi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam	Masih ditemukan beberapa kendala. Pengelolaan website masih belum optimal. Sehingga media sosial lebih berperan

melaksanakan keterbukaan informasi publik (studi di komisi pemilihan umum kota bandar lampung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020)

dalam penyebaran informasi dibandingkan website. Hanya ada satu media sosial yang difokuskan sebagai media informasi.

Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Penelitian Terdahulu

Program keterbukaan informasi ini melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), karena masih berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa belum ditemui kegagalan, karena masih terus dikembangkan dan masih terus berproses hingga saat ini (Sari, Dewi, Ruslyhardy , & Sudaryanto).

Keberhasilan

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu membangun sistem keterbukaan informasi publik yang reliable
- 2) Belum menerapkan asas keterbukaan, yaitu masih banyak dari seluruh hasil kegiatan dan kinerja tidak dapat diketahui oleh publik serta beberapa kasus sengketa informasi yang sedang ditangani oleh Komisi Informasi
- 3) Penggunaan teknologi informasi belum optimal serta akses pemilih yang masih terbatas oleh informasi yang memadai dikarenakan pengelola belum melakukan pembaharuan data dan personalisasi secara berkelanjutan
- 4) Keterlambatan pelayanan, personel pengelola yang memiliki rangkap beban kerja, anggaran yang tersedia untuk kegiatan sangat terbatas sehingga menghambat upaya pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat.
- 5) Pengelolaan website masih belum optimal. Sehingga media sosial lebih berperan dalam penyebaran informasi dibandingkan website. Hanya ada satu media sosial yang difokuskan sebagai media informasi

Inovasi Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Guguk

Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan elemen penting dalam keamanan nasional. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, lembaga publik lainnya, dan segala sesuatu yang mempengaruhi kepentingan publik. Manajemen kehumasan merupakan salah satu upaya menuju pengembangan masyarakat informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (selanjutnya disebut PPID) adalah pegawai yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau penyediaan layanan informasi pada lembaga publik (Febriananingsih, 2012).

Sasaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah meliputi aspek keterbukaan, akses informasi, pengelolaan dokumen, dan transparansi. Beberapa tujuan utama PPID di sekolah antara lain:

- 1) Keterbukaan informasi
Memberikan akses terbuka terhadap informasi relevan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk siswa, orang tua, guru, staf sekolah, dan masyarakat umum.
- 2) Kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Memastikan sekolah mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan terkait, termasuk menyediakan informasi yang perlu diakses oleh masyarakat.
- 3) Manajemen dokumen yang efisien
Manajemen dan penyimpanan dokumen sekolah secara fisik dan digital secara efisien, membuat arsip lebih mudah ditemukan, digunakan, dan dipelihara.
- 4) Transparansi sekolah
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pimpinan sekolah dengan memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan.
- 5) Memperkuat komunitas
PPID secara khusus memperkuat komunitas orang tua dan siswa dengan menyediakan informasi yang mereka butuhkan untuk mendukung partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan.
- 6) Meningkatkan kualitas Pendidikan
PPID memberikan informasi tentang program, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, kinerja siswa, dan masalah terkait lainnya untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
- 7) Perlindungan data pribadi
Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi siswa dan warga sekolah lainnya serta memastikan pengelolaan informasi mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku.
- 8) Peningkatan efisiensi manajemen
PPID bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses administrasi seperti pengelolaan dokumen.
- 9) Mengelola keluhan dan pertanyaan umum
Menyediakan mekanisme yang efektif untuk menanggapi keluhan dan permintaan masyarakat mengenai informasi yang diberikan.
- 10) Menciptakan budaya terbuka
Membangun budaya keterbukaan di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyediaan, pengelolaan, dan penggunaan informasi.

Tujuan tersebut diharapkan menciptakan lingkungan sekolah yang transparan, inklusif, dan mendukung partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam komunitas pendidikan. Dengan mencapai tujuan tersebut, PPID dapat meningkatkan hubungan

sekolah-masyarakat dan menjadi motor penggerak pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik.

Dampak Inovasi Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Guguak

Inovasi Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Guguak memberikan dampak terhadap manajemen informasi dan data sekolah serta berdampak kepada seluruh warga sekolah.

Dampak Positif

- 1) Terwujudnya keterbukaan informasi, tempat dimana informasi dan dokumen mengenai kegiatan dan pelaporan keuangan di sekolah dipublikasikan dan tersedia bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui ruang lingkup kegiatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan di sekolah. Informasi adalah informasi, pernyataan, gagasan, dan simbol-simbol yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca, mengandung nilai, makna, pesan, data, fakta, dan penjelasan, serta tersedia dalam berbagai kemasan dan format seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (Muhammad, 2017).
- 2) Semakin terbukanya informasi badan publik saat ini akan menghindari rasa curiga dan wasangka oleh publik.
- 3) Bagi siswa, adanya keterbukaan informasi, siswa dapat mengakses informasi dan dokumentasi berkaitan dengan kegiatan, prestasi siswa dan sekolah.
- 4) Bagi guru, dapat mengakses informasi dan dokumentasi sekolah.

Dampak Negatif

- 1) Banyak terjadi kasus-kasus pemerasan terhadap institusi atau perorangan tidak memberi kontribusi tertentu, maka akan disebar/dipublikasikan informasi negatif yang dimiliki institusi atau perorangan, sehingga citranya akan menurun bahkan terjadi pembunuhan karakter (Anis, Usman, & Arfah, 2021).
- 2) Pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan, seperti mencari informasi yang seharusnya bersifat tertutup atau informasi yang dikecualikan (Sari, Dewi, Ruslyhardy, & Sudaryanto).
- 3) Di Era informasi saat ini, membuat membludaknya informasi yang terkadang informasi-informasi tersebut belum jelas sumber dan kebenarannya, sementara informasi tersebut sudah tersebar luas di masyarakat (Suhendar, 2010).
- 4) Pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan informasi tersebut sering mengambil keuntungan dari apa yang terjadi demi mendapatkan citra yang baik bagi kepentingannya.
- 5) Informasi-informasi yang negatif dan sudah tersebar di masyarakat/publik, sering menimbulkan kegaduhan dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mempercayai mana lembaga/institusi/perorangan yang benar dan mana yang salah

SIMPULAN

Mengidentifikasi strategi efektif untuk memperkuat peran PPID di sekolah. Dengan memahami kompleksnya tantangan yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan informasi dan memasukkan peran strategis PPID, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

positif terhadap optimalisasi pengelolaan informasi di lingkungan pendidikan. Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan elemen penting dalam keamanan nasional. Sasaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah meliputi aspek keterbukaan, akses informasi, pengelolaan dokumen, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan struktur organisasi PPID yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelatihan rutin anggota PPID menjadi kunci untuk mencapai tujuan transparansi dan efisiensi. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi yang dapat diterapkan melalui PPID di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alou, L. L., Liando, D. M., & Lengkong, o. P. (2021). Efektivitas Program Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal pengelolaan sumberdaya pembangunan*, 1(1), 81-93.
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Kajian ilmiah mahasiswa administrasi publik*, 2(3), 1105-1116.
- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Jurnal of covornance and local politics*, 2(2), 151-163.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal rechts vinding : media pembinaan hukum nasional*, 1(1), 135-146.
- Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal ilmu administrasi publik*, 2(2), 146-157.
- Nababan, S. (2019). Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 166-180.
- Ramadhanty, A. P. (2020). Strategi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020). *Digital Repository Unila*.
- Sari, F. M., & Ahmad, D. (2017). Strategi Pengelolaan Informasi Publik pada Website ppid.bandung.go.id. *Hubungan Masyarakat*, 389-393.
- Sari, F. M., Dewi, C. M., Ruslyhardy, & Sudaryanto. (n.d.). Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 64-74.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian tindakan)*. CV. Alfabeta.
- Suhendar, A. (2010). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal wacana kinerja*, 13(2), 243-251.